

**Pengaruh Pro & Kontra Pilkada 2020 Pada Media Sosial Twitter
(Drone Emprit: Pilkada 2020 - Pro & Kontra)****Terang Bintang Samuel Silalahi¹, Ahmad Toni²**^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta, Indonesia.

Email: 11971600349@student.budiluhur.ac.id; ahmad.toni@budiluhur.ac.id

Submitted: 15 Oktober 2021 **Revised:** 26 Oktober 2021 **Accepted:** 29 Oktober 2021**ABSTRAK**

Di Indonesia Pilkada direncanakan untuk diselenggarakan pada akhir tahun 2020 yaitu ditanggal 9 Desember 2020. Dikutip dari data yang diambil dari droneemprit.id, TREN 'PILKADA' tercatat sekitar (175k) percakapan di media sosial Twitter. Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk meneliti komunikasi politik yang terjadi di media sosial twitter terkait dengan pro dan kontra terhadap pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini. Komunikasi politik yang dibangun melalui media sosial twitter, dapat membentuk suatu opini dalam publik dan juga dapat menggerakkan suatu dukungan politik secara masif, perlu diketahui bahwa twitter memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi, dan mampu membentuk hasil dari suatu kampanye (Caplan, 2013, 12). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan analisis data twitter pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) *Social Network Analysis* (SNA) dari big data Drone Emprit. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pergejolan bisa saja terjadi pada media sosial twitter serta memberikan pengaruh pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Pro dan Kontra adalah hal yang biasa terjadi oleh karena itu, Pemerintah dan penyelenggara harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tetap mengikuti pesta demokrasi ini dengan mentaati protokol kesehatan ketat dengan memanfaatkan media, karena melalui media sosial komunikasi politik dapat terjadi secara masif, meskipun media sosial memberikan efek pada jumlah pemilih pada Pilkada 2020 kali ini yang tidak memenuhi dari target yang sudah ditetapkan oleh KPU yaitu 77,55% dari total daftar pemilih 105 juta jiwa.

Kata Kunci: Pilkada, Twitter, Komunikasi Politik**ABSTRACT**

In Indonesia, the Regional head elections is planned to be held at the end of 2020, which is December 9, 2020. Quoted from data taken from droneemprit.id, the 'PILKADA' TREND recorded around (175k) conversations on Twitter social media. The main purpose of this study is to examine the political communication that occurs on Twitter social media related to the pros and cons of the implementation of the 2020 Pilkada. Political communication that is built through Twitter social media, can form an opinion in the public and can also mobilize massive political support.). In this study, researchers used a qualitative descriptive method, and Twitter data analysis in this study used library research (library research) Social Network Analysis (SNA) from big data Drone Emprit. The conclusion of this study is that political communication Pros and Cons can happen on Twitter social media and have an influence on the holding of the 2020 Pilkada. Pros and Cons are common things, therefore, the Government and organizers must be able to convince the public to continue to follow the democratic party. This is done by adhering to strict health protocols by utilizing the media, because through social media political communication can occur massively, even though social media has an effect on the number of voters in the 2020 Pilkada this time which does not meet the target set by the KPU, which is 77.55% of the total number of voters. total voters list 105 million people.

Keywords: Regional head elections, Twitter, Political Communication**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Pilkada pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan september tahun 2020 sesuai keputusan pada UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 pada ayatnya yang ke 6, namun mengingat situasi pandemi covid-19 di

Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan, maka DPR dan Pemerintah beserta seluruh panitia penyelenggara pemilu sepakat untuk *mereschedule* pelaksanaan Pilkada lewat (Perppu) No. 2 Tahun 2020, menjadi tanggal 9 Desember 2020. Kesepakatan ini

dinilai sangat kontroversial dan terus menjadi perdebatan dikalangan akademisi, karena dimasa pandemi covid-19 Pemerintah secara konsisten menghimbau masyarakat melalui berbagai media untuk tidak melakukan kegiatan secara berkerumun atau berkumpul tetapi tetap memustikan agar Pilkada 2020 bisa terlaksanakan meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Penetapan Pilkada pada Desember 2020 dianggap tidak memikirkan khalayak banyak, karena menurut (Ramadhan, 2020) berdasarkan data pada 16 Mei 2020 jumlah penyebaran pasien terkonfirmasi positif Covid-19 semakin menanjak secara global di seluruh daerah di Indonesia. Banyak pihak yang khawatir, jika Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020 yang berdampak pada penambahan klaster baru penyebaran Covid-19. Permasalahan utama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini, terlebih karena pelaksanaannya masih pada masa pandemi Covid-19, yang mana pemerintah mengharuskan seluruh warga negara untuk menerapkan *physical* dan *social distancing*. Sementara itu, pelaksanaan Pilkada ini sendiri identik dengan aktivitas berkerumun dan berkumpul, mulai dari tahap awal penyusunan daftar pemilih hingga sampai ke pemungutan suara. Para pasangan calon juga tentunya akan melakukan kampanye, untuk menarik simpati dan suara dari masyarakat (Hergianasari, 2016).

Banyak kalangan pesimis terhadap Pilkada 2020 ini akibat dari situasi yang sangat tidak kondusif dimasa pandemi covid-19 saat ini, karena kesehatan masyarakat dan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah saat ini jauh lebih utama dari pada pelaksanaan Pilkada, yang sarat akan kepentingan dari berbagai pihak. Namun perlu untuk diketahui bersama bahwa Pilkada pada Desember tahun 2020 ini, merupakan suatu amanat yang penting dari Undang-undang dan harus dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi seperti saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa

masyarakatlah pemeran utama kesuksesan setiap Pilkada yang diselenggarakan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dengan tingkat kesadaran yang tinggi dan dengan bijaksana, ikut serta bersinergi dengan Pemerintah dan penyelenggara Pilkada untuk membendung laju penanganan Covid-19, karena jika tidak akan menambah daftar cacatan penyebaran dan cluster baru Covid-19 di Indonesia.

Menurut data International IDEA di artikel “Global Overview of Covid-19: Impact on elections, disebutkan bahwa akibat dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan oleh Pemerintahnya, sedikitnya ada 50 wilayah dan negara yang masih menghadapi potensi penyebaran dari pandemi covid-19, sehingga beberapa negara memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Menurut data International IDEA ada juga beberapa negara yang tetap melaksanakan Pemilu maupun Pilkada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tetap melaksanakan Pemilu dan Pilkada dimasa pandemi, dan layak dijadikan sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum di kondisi pandemi Covid-19. Ini dikarenakan Korsel menyampaikan pesan secara masif terkait sosialisasi penerapan protokol pada saat Pemilu dan pengawasan ketat pada saat pelaksanaan Pemilu.

Komunikasi politik merupakan suatu metode penyampaian informasi tentang kegiatan atau hal-hal politik yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebaliknya. Komunikasi politik pada hal ini ialah suatu gabungan dari beberapa ilmu akademis menjadi suatu kegiatan, yang paling utama mengenai komunikasi dan politik (Djuyandi; 2017). Komunikasi politik yang terjadi dapat sering ditemukan pada sosial media hingga media cetak seperti koran, sehingga media dalam hal ini media sosial merupakan suatu hal yang mempunyai peranan

utama pada sistem suatu kegiatan politik dan kesuksesan komunikasi dari politik tersebut akan mempengaruhi pada pengukuhan peranan politiknya. Menurut Anwar Arifin (2015) komunikasi politik memiliki 4 tujuan utama yaitu, pertama untuk menciptakan dan membangun opini dan citra publik; kedua untuk meningkatkan perhatian publik terhadap suatu hal politik; ketiga untuk memenangkan suatu kampanye atau pemilihan; keempat untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan dari suatu negara atau publik.

Pada buku yang ditulis oleh Ross Tapsel (2017) yang berjudul kuasa media di Indonesia diungkapkan bahwa media digital dapat mempengaruhi massa yang ada di Indonesia. Para penduduk di Indonesia masuk dalam kategori pengguna media sosial terbanyak dan teraktif se-dunia, sehingga dengan kekuatan media yang begitu masif masyarakat dapat terpengaruhi dengan begitu cepat. 70% dari populasi penduduk yang ada di Indonesia berusia antara 35 tahun kebawah, yang mana pada usia tersebut adalah usia yang mayoritas menggunakan media sosial setiap harinya. Pada tahun 2015 juga diketahui jumlah pengguna *Facebook* di Indonesia mencapai 64 juta jiwa, sehingga menduduki posisi ke 4 terbanyak di dunia, dan terdapat 20 juta jiwa di Indonesia yang menggunakan *twitter* sehingga menduduki posisi ke 3 terbanyak di dunia. Banyak narasi dan opini yang bernada pro maupun kontra terkait polemik atas tetap dilaksanakannya Pilkada pada tahun 2020 pada new media terlebih media sosial *twitter*. Para Buzzer juga mulai terlibat dalam narasi dan hastags kampanyenya untuk membela serta menyerang pasangan calon maupun kebijakan-kebijakan dan keputusan pemerintah agar tetap melanjutkan Pilkada dimasa pandemi covid-19. Tujuan dari para buzzer ini adalah untuk mempengaruhi pembaca atas narasi dan hastags yang dikampanyekan. Polemik ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat pelaksanaannya

sendiri dimasa pandemi covid-19 disaat jumlah kasus penyebarannya terus bertambah diseluruh dunia. Media sosial *twitter* juga dipilih sebagai sarana mempromosikan diri juga mampu memberikan tempat bagi politisi untuk menginformasikan berbagai hal dengan real time tentang kegiatan politiknya (Aharony, 2010, 589), serta mampu menghilangkan jarak antara politisi dengan masyarakat atau pembacanya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Coutss & Gruman (2005: 254) yakni komunikasi yang dimediasi oleh komputer, akan menghasilkan kesetaraan partisipasi yang lebih tinggi dari pada komunikasi tatap muka. Pandangan tersebut didukung dengan fakta terkait kepriawaian mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam mengelola dan menggunakan teknologi new media seperti media sosial disetiap kegiatan politiknya, sehingga mampu mengalahkan lawan politiknya Jhon McCain (Aaker dan Chang, 2010; Manlow dan Friedman, 2009).

Melihat uniknya kasus ini, penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Pro dan Kontra Pilkada 2020 menjadi trending di *twitter*, dan bagaimana Pemerintah dan penyelenggara dalam hal ini KPU meyakinkan masyarakat untuk tetap mengikuti pesta demokrasi ini dengan mentaati protokol kesehatan ketat. Penulis mencoba mencari gambaran berdasar data-data yang ada di media massa, mencari literatur dan jurnal terkait pelaksanaan Pilkada di era pandemi Covid-19 dan juga mencari literatur terkait pengaruh media sosial terutama *twitter* terhadap Pilkada.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013), penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah suatu cara yang digunakan untuk menemukan ilmu atau pandangan teori tentang penelitian pada kurun

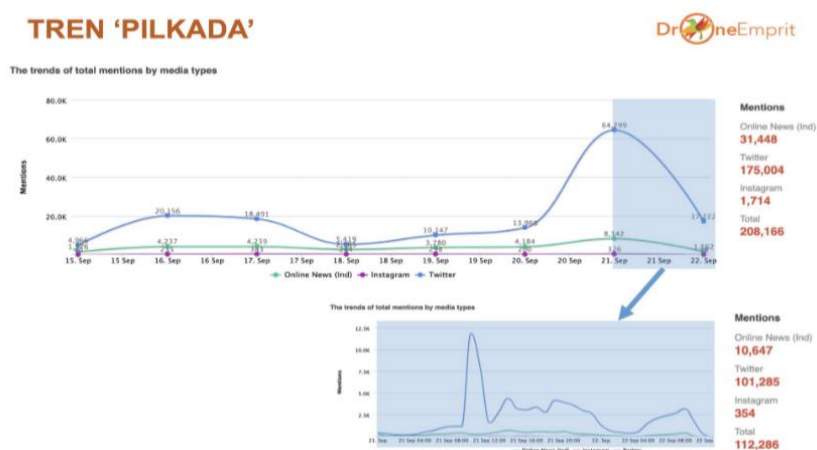
waktu tertentu. Sementara menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif juga dapat dipakai dalam meneliti kondisi suatu obyek yang alamiah, instrument utamanya terletak pada peneliti, data dikumpulkan dan dapat dilakukan secara gabungan (triangulasi), data yang dianalisa bersifat kualitatif atau induktif, sehingga hasil yang didapat lebih berpusat kepada makna. Metode pengumpulan data pada kajian ini adalah studi kepustakaan (library research). Menurut Nazir (2013), studi kepustakaan itu merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap sumber sumber yang sebelumnya sudah ada seperti catata, buku, literatur, hingga laporan yang ada berkaitan dengan tujuan dari permasalahan yang sedang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Kemunculan Pro dan Kontra

Seminggu terakhir (15-22 September 2020) percakapan tentang "Pilkada" cukup tinggi. Tercatat sekitar 208k percakapan, di media sosial Twitter terdapat (175k)

percakapan, melalui berita online terdapat (31k) percakapan, dan di media sosial IG terdapat (1,7k) percakapan yang terjadi. Tercatat juga sejak 21 September terdapat (112k) percakapan, di media sosial Twitter (101k) percakapan, melalui berita online tercatat (10k) percakapan, dan melalui media sosial IG terdapat (354) percakapan, saat, Bapak Tito Karnavian, KPU & Bawaslu, hingga Komisi II DPR dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020. Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai pemimpin rapat dan Ketua Komisi II DPR, pada Senin, 21 September 2020. Keinginan Pemerintah yang memaksakan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020, dimana penambahan kasus penularan covid-19 terus bertambah sehingga membuat masyarakat terus bergejolak. Banyak pihak yang mengusulkan untuk pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini di tunda sementara, mengingat grafik peningkatan penyebaran wabah virus covid-19 terus bertambah.



Gambar 1. Tren Mentions Pilkada di Media
Sumber: DroneEmprit, 2020

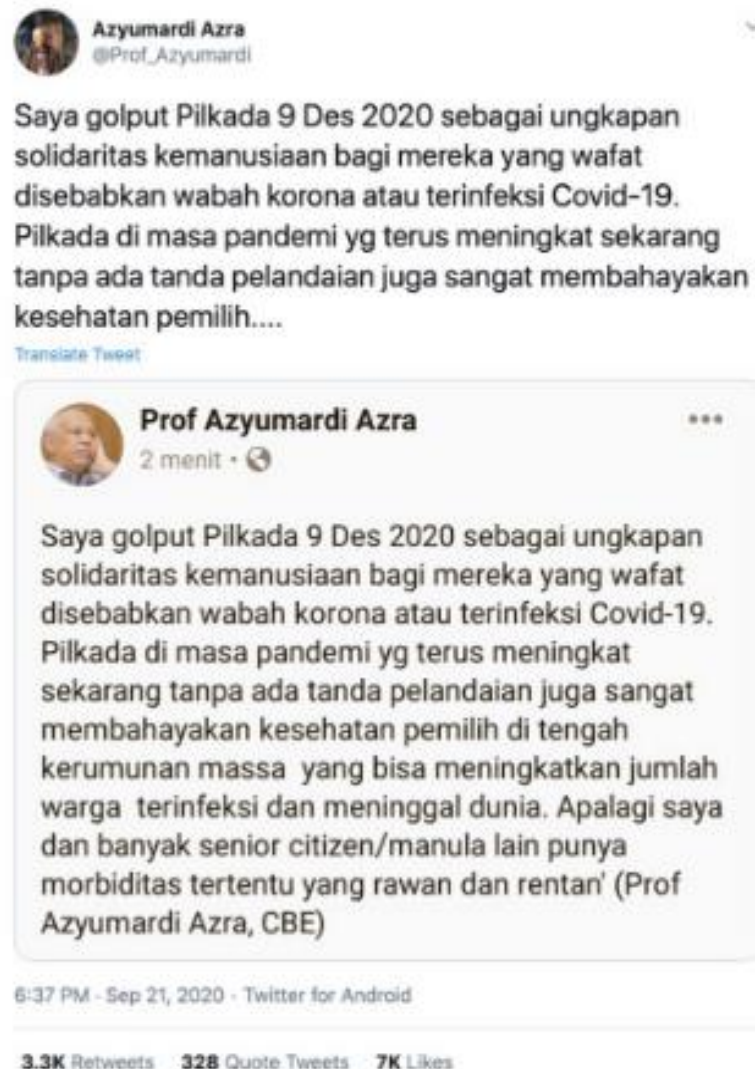
Narasi dan Opini Kontra Pilkada 2020

Melalui media sosial twitter pribadinya narasi atau pernyataan yang bernada kontra disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE, beliau merupakan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sir I Guru

Besar UIN Jakarta, beliau juga dikenal sebagai cendekiawan muslim, untuk tweetnya tersebut mendapatkan 3,3K retweets dan 7K likes. Pernyataan yang cukup mengejutkan dari Prof @Prof_Azyumardi, ialah beliau akan memilih

untuk GOLPUT pada Pilkada 2020 ini, sebagai wujud kepedulian bagi korban pandemi covid-19 yang wafat, dan tautan ini paling banyak disukai dan paling banyak dishare pengguna

twitter. Pemahaman yang seperti ini tentunya dapat meningkatkan pergejolakan pada masyarakat agar melakukan hal yang serupa.



Gambar 2. Tweet Kontra Prof. Azyumardi Azra
Sumber: Twitter, 2020

Hal yang bernada kontra juga datang dari dr. Gunadi, Ph.D,Sp.BA, beliau mengatakan melalui media sosial pribadi twitternya “Win2 solution aja gmn pak @jokowi, semua pilkada ditunda kecuali solo

dan medan ? Setuju ya pak ? Yg penting gibran dan bobby jadi walikota, daerah lain sptnya ga penting2 amat buat bapak, ok ya..”, untuk tweetnya tersebut mendapatkan 2,5K retweets dan 4,4K likes.

MOST RETWEETED 'PILKADA' /1



Avatar	User	Status	#Followers	#Retweeted	All Time
	Azyumardi Azra @Prof_Azyumardi	Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19. Pilkada di masa pandemi yg terus meningkat sekarang tanpa ada tenda pelandian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih.... https://t.co/Vh0YVv6yq4 21/Sep/2020 18:37 WIB LatGraph	28,247	2,215	3,228 6,790
	Dr. Gunawan @GundiDr	Win2 solution aja gmn pak @jokowi, semua pilkada ditunda kecuali solo dan meden? Setuju ya pak? Yg penting giban dari bobby jadi walikota, daerah lain spnys ga penting2 amat buat bapak, ok ya.. 21/Sep/2020 14:48 WIB LatGraph	39,734	1,899	2,424 4,342
	Farid Gaban @faridgaban	NU dan Muhammadiyah itu ada-ada saja... minta pilkada ditunda. Terus gimana dong anak dan menantu gue yg udah ngebet jadi walikota? Kalian nggak punya perasaan. Usui itu mbok, ya, yang solutip... 21/Sep/2020 13:37 WIB LatGraph	13,599	942	1,501 5,139
	Pegawhy @msofyan	Bayangin kalo ada zombie outbreak terus negara tetep mau adain pilkada 21/Sep/2020 18:50 WIB LatGraph	14,758	531	1,247 2,573
	Gia Pratama @GiaPratamaMD	Siapa yang masih peduli Pilkada? serius deh. yang boro-boro semangat mengikuti rangkaian kampanye, debat, sampe pencoblosan, dan yang udah ga peduli pilkada tahun ini ada atau engga. coba RT. 21/Sep/2020 19:57 WIB LatGraph	265,880	726	1,182 419

Gambar 3 Besar Retweet Kontra Pilkada 2020

Sumber: DroneEmprit, 2020

MOST RETWEETED 'PILKADA' /2



	Jack Separo Gendeng @sudjwotedjo	NU & Muhammadiyah sbg omas besar minta Pilkada ditunda km Corona. Ini benarnya orang banyak. Penguasa tetap ingin Pilkada tepat waktu. Ini benarnya sendiri. Benarnya orang banyak dan benarnya sendiri belum tentu adalah kebenaran. Mari kita tunggu yg ketiga: BENAR YG SEJATI 21/Sep/2020 14:35 WIB LatGraph	1,780,754	868	1,169 2,496
	VIVA @VIVA	Muhammadiyah Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda https://t.co/PD8WUVPHF 21/Sep/2020 11:39 WIB LatGraph	4,230,112	536	1,003 2,983
	Lukman H. Salfuddin @lukmansalfuddin	Tujuan berpolitik itu untuk kemanusiaan. Bila tahapan Pilkada dapat mengancam keselamatan jiwa, lalu untuk tujuan apa ia diadakan? 21/Sep/2020 10:25 WIB LatGraph	493,026	543	904 3,130
	dr. tompi spBP @dr_tompi	TUNDA PILKADA ! 21/Sep/2020 21:21 WIB LatGraph	1,118,603	501	799 2,201
	Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono	Saran terakhir untuk oligarki: 1. Tunda Pilkada, fokus ke pandemi. Pejabat hanya menjalankan pelayanan publik rutin dan penanganan pandemi. Tidak membuat kebijakan strategis. 2. Tarik pasukan non-organik dari Papua. Bentuk komite dialog. 3. Hentikan pembahasan Omnibus Law. 21/Sep/2020 20:37 WIB LatGraph	169,587	433	691 1,850

Gambar 4 Besar ke Dua Retweet Kontra Pilkada 2020

Sumber: DroneEmprit, 2020

Narasi-narasi diatas mendorong agar pilkada 2020 untuk ditunda dahulu. Dikutip dari Serambi News (2020), Dr. Agustin Teras Narang, S.H. yang termasuk dalam jajaran pimpinan DPD RI, pada sesi tanya jawab dengan media, beliau menyampaikan bahwa disaat yang bersamaan Indonesia dan semua negara yang ada dunia ini tengah berjuang agar mampu menurunkan dan menghentikan penyebaran dari virus covid-19 ini, bahkan artis berikut dokter Tompi , juga ikut menyuarakan penundaan Pilkada 2020 ini, berikut dengan media berita VIVA juga turut

memberitakan terkait penudunda Pilkada 2020, dimana kita ketahui jumlah pengikut akun twitter tersebut mencapai jutaan orang, yang tentunya akan memberikan pengaruh pada keputusan dan pemikiran para pengikutnya, sementara Pemerintah pusat dan daerah juga harus turut serta aktif dalam penanganan untuk menekan tingkat penambahan kasus Covid-19 di setiap wilayah atau daerah. Di saat yang bersamaan, WHO yang merupakan induk dari badan kesehatan dunia turut menyampaikan bahwa penambahan kasus Covid-19 masih terus aktif

dan menyebar hingga saat ini. Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2020 ini melibatkan kurang lebih 105 juta penduduk yang ada di Indonesia, tersebar di 270 daerah yang tentunya rawan dan rentan akan penyebaran covid-19 (Eda, 2020).

Narasi dan Opini Pro Pilkada 2020

Himbauan yang bernada Pro disampaikan Polres Trenggalek melalui akun media sosial twitternya dengan hastag

#MaklumatKapolriTaataProkres, akun media sosial twitter Polres Trenggalek menghimbau agar masyarakat taat atau mematuhi protokol kesehatan pada saat Pilkada. Kepolisian RI yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan jalannya Pilkada pun turut memberikan perhatiannya untuk mengurai dan mengantisipasi terjadinya kerumunan atau keramaian, yang berpotensi menambah kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia.



Gambar 5 Himbuan Polres Trenggalek Untuk Taat Prokes Saat Pilkada
Sumber: Twitter, 2020



Gambar 6. Top Hastags Untuk Taat Prokes Saat Pilkada
Sumber: DroneEmprit, 2020

Berikut juga populer hastags untuk taat protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020

yang disampaikan oleh jaringan Humas Polri dari berbagai daerah, dan juga dari para

pendukung pasangan calon yang mengajak masyarakat untuk tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan agar pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi covid dapat terlaksana dengan

semestinya tanpa menciptakan cluster penyebaran kasus covid-19 yang baru.

Alasan Pemerintah Untuk Melanjutkan Pilkada 2020



Gambar 7 Perbandingan Kasus Covid-19 dan Alasan Pemerintah Lanjut Pilkada 2020

Sumber: Katadata, 2020

Sesuai dengan data terbaru pada 02 Oktober 2021, negara Indonesia menduduki peringkat 23 secara global terkait penambahan kasus positif Covid-19. Presiden Jokowi juga berpesan mengutip dari Setkab.go.id pada Minggu 04 Oktober 2020, agar seluruh masyarakat Indonesia tetap optimis dalam menghadapi tantangan, terutama tantangan virus corona supaya Indonesia dapat melewati masa pandemi covid-19. Perlu diketahui juga, bahwa ada beberapa negara yang tetap melaksanakan Pilkada sementara peringkat penyebaran covid-19 jauh lebih tinggi dari Indonesia. US berada pada urutan pertama terdapat sekitar 7,49 Juta kasus, India sekitar 6,39 Juta kasus, Brasil sekitar 4,84 Juta kasus,

dan Rusia sekitar 1,19 Juta kasus. Juru Bicara Kepresidenan Indonesia juga menyatakan, bahwa Pilkada tahun ini akan tetap diselenggarakan. Juru Bicara Presiden juga mengatakan, bahwa banyak negara yang tetap melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19 seperti Amerika Serikat (US), yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan Kepala Negaranya (Presiden) pada November 2020 mendatang. Menurut Juru Bicara Presiden, Indonesia patut menjadikan hal ini sebagai contoh terkait pelaksanaan Pemilu dimasa pandemi, namun tetap harus dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan yang ketat.

KESIMPULAN

Proses Pilkada kali ini seperti memberikan keleluasaan kepada para panitia penyelenggara Pilkada, kandidat maupun Pemerintah dalam hal menyebarkan konten-konten secara verbal maupun nonverbal agar menciptakan personal branding dan atau konten untuk menghimbau masyarakat agar taat protokol kesehatan pada saat pra dan pasca Pilkada. Masing-masing gencar melakukan komunikasi politik ke publik melalui media sosial guna mencari suara massa. Komunikasi politik yang terjadi di media sosial twitter sangat dimanfaatkan oleh para buzzer dengan menyertakan hastags atau tagar untuk meningkatkan frekuensi pembicaraan tentang pilkada sehingga mencapai trending topic. Kemunculan buzzer ini sendiri juga merupakan suatu fenomena yang menarik, sebab Jeff Staple yang merupakan pakar dari media sosial mengatakan bahwa buzzer boleh digambarkan atau dimaknai seperti orang atau akun yang narasi atau opininya dapat membuat pengikutnya atau orang lain bereaksi setelah melihatnya.

Tercatat jumlah pemilih pemula pada 18 Juli 2020 bertambah sebanyak 456.256 orang, yang pada tanggal 09 Desember 2020 nanti sudah berusia 17 tahun dan jumlah kaum milenial sesuai data yang di dapat dari BPS pada tahun 2019 yakni sebanyak 83.992.000 orang. Para pemilih pemula dan kaum milenial ini nantinya diharapkan dapat terlibat agar mau menggunakan hak suaranya atau terpengaruh untuk tidak memilih, mengingat dalam realitasnya twitter sebagai bentuk komunikasi politik dapat menciptakan motivasi, aktivasi dan diferensiasi kepada para pengikut atau pembacanya, karena informasi yang disampaikan langsung kepada pribadi dan lebih intim dari pada melalui televisi dan radio, sehingga memberikan potensi ruang gerak kepada kaum milenial tersebut untuk menentukan responsnya.

Komunikasi dalam politik dapat dimaknai menjadi suatu metode

berkomunikasi yang dapat berdampak pada aktifitas politik itu sendiri (Hafied Cangara, 2009). Sementara Komunikasi politik pada Pilkada merupakan suatu cara untuk mengetahui strategi berkomunikasi suatu partai berikut tim dan para calon pasangan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Deddy Mulyana (Guru Besar Ilmu Komunikasi FIKOM UNPAD) bahwasannya komunikasi politik dapat diartikan sebagai pertukaran makna yang dapat mempengaruhi pengelolaan kekuasaan, sehingga perebutan suara politik sangat sengit dan terlihat begitu jelas. Hal ini terlihat jelas dari adu janji dan visi misi antara para kandidat (komunikator politik) agar mendapatkan simpatik dari pemilih (komunikan) dengan berbagai pesan politik (message) yang disampaikan melalui media komunikasi politik (channel) untuk memenangkan Pemilu atau Pilkada (effect).

Pemerintah dan aparat negara sebagai garda terdepan harus mampu melakukan pengawasan dan mengontrol arus informasi yang terjadi pada new media dalam hal ini media sosial twitter. Disamping dari keunggulan pemanfaatan penyampaian informasi menggunakan media sosial seperti twitter selain dapat menembus segala lapisan masyarakat serta kecepatan dalam penyampaian informasi, disaat yang bersamaan juga terdapat ancaman seperti penyebaran hoaks atau informasi-informasi yang di publish rentan untuk dimanipulasi itulah sebabnya perlu pengawasan dan penyaringan dari Pemerintah serta aparat negara. Media dalam komunikasi politik pada Pilkada tahun ini diharapkan dapat menjadi media yang transparan dan independen untuk setiap komunikator politiknya, serta isu-isu tentang berjalannya proses Pilkada dari awal hingga akhir, dapat dipublikasikan berdasarkan sumber yang terpercaya dan dapat dibuktikan, untuk menghindari terjadinya kegiatan atau hal yang sama sekali tidak direncanakan sehingga semua peserta Pilkada dari penyelenggara dan hingga pemilih dapat

dengan tenang dan aman mengikuti Pilkada, begitu juga pada saat kampanye, pengaplikasian media sosial twitter mohon untuk digunakan sebijaksana mungkin sebagai cerminan komunikasi politik jujur dan bersih.

Pemerintah juga wajib bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi covid-19, sehingga penyelenggara Pilkada dan masyarakat dapat memahaminya dengan bijaksana dan cermat. Terkait Pro dan Kontra yang terjadi dilansir dari media Nasional Tempo 02 Oktober 2020, menurut MENKO POLHUKAM Mahfud Md bahwa kontroversi atau Pro dan Kontra yang ada pada setiap penyelenggaraan Pilkada adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi, dan pemicu dari pro dan kontra Pilkada 2020 ini adalah tentang penyelenggaraannya di waktu virus covid-19 yang terus bertambah di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah dan penyelenggaran harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tetap mengikuti pesta

demokrasi ini dengan mentaati protokol kesehatan ketat dengan memanfaatkan media, karena melalui media sosial komunikasi politik dapat terjadi secara masif. Namun dibalik pelaksanaan Pilkada 2020 ini masih ada target yang belum mampu dicapai oleh KPU sebagai penyelenggara, yakni jumlah pemilih pada tahun ini hanya mencapai 77,55 persen dari total jumlah pemilih. Media sosial dalam hal ini twitter dapat memberikan efek pada masyarakat untuk tidak mengikuti Pilkada dan memilih untuk tidak mencoblos pilihan manapun. Semoga pada Pilkada di tahun berikutnya Pemerintah dan penyelenggara dalam hal ini KPU dapat memberikan perhatian lebih pada pengguna media sosial seperti twitter untuk memberikan efek kepada masyarakat atau pembaca sehingga dapat terpengaruh untuk memberikan perhatiannya pada Pilkada sehingga mencapai jumlah target pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aharony, N. (2012). Twitter Use By Three Political Leaders: An Exploratory Analysis. *Emerald Online Information Review*, 587-603.
- Andika Sanjaya, I. T. (2019). STRATEGI PEMENANGAN DAN KOMUNIKASI POLITIK HENDRAR PRIHADI BERBASIS TWITTER. *JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA*, 82-91.
- Anshari, F. (2016). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 91–101.
- Anshari, F. (2016). Personal Branding of Anies Baswedan Through Facebook And Twitter Account: Study Of Image Grid Analysis in Banjarmasin Society Aged 17 –24 Years. *Journal of Government and Politics*.
- APJII. (2017). Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Ineternet Indonesia*.
- Arifin, B. (2015). *Pengguna Twitter Indonesia Terbanyak Ketiga Dunia*. Retrieved from <http://www.encycity.co/penggunatwitter-indonesia-terbanyak-ketigadunia/>
- Ashari Sakti Alim, D. E. (2021). KOMUNIKASI POLITIK ANIES BASWEDAN MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER. *Jurnal Academia Praja*.
- Bungin, B. (2018). *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*
- Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Covid-19. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/22572791/kpu-akan-gelarsimulasi-pilkada-di-tengah-pandemicovid-19?page=all>, K. A. (2021, Juli).
- Deliusno. (2015). *Pengguna Twitter di Indonesia Capai 50 Juta*. Retrieved from <http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/16465417/pengguna.twitter.di.indonesia.capai.50.juta>.
- Dieni Nurdianingsih, D. F. (2016). KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA TWITTER WALIKOTA BANDUNG (Studi Analisis Framing Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Online 2015 di Media Sosial Twitter Walikota Bandung). *Universitas Islam Bandung*.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- F, A. (2016). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 91-101.
- Fatani, M. N. (2014). Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet. *IPTEK-KOM VOL. 16 No.1*, 17-28.
- Firmansyah, T. (-p.-w.-b. (2021, Juli). <https://kumparan.com/sabila-nurul-1608551593366524127/peran-komunikasi-politik-dalam-pilkada-2020-di-tengah-situasi-pandemi-1upBQI5104u/full>. (2021, Juli).

- <https://pers.droneempit.id/pilkada-2020-pro>. (2021, Juli).
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/30882/siaran-pers-no-147hmkominfo112020-tentang-tingkatkan-koordinasi-penanganan-konten-pilkada-2020-agar-ruang-siber-sehat/0/siaran_pers. (2021, Juli).
- Ihsanuddin, F. K. (2017, september). *Buzzer Politik Diusulkan Jadi Profesi Terlarang di Indonesia*. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2017/02/22/15170807/buzzer.politik.diusulkan.jadi.profesi.terlarang.di.indonesia>
- Juditha, C. (2015). Cyberstalking Di Twitter Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol 18 No.1*, 15-28.
- Juditha, C. (2015). FENOMENA TRENDING TOPIC DI TWITTER: ANALISIS WACANA TWIT #SAVEHAJILULUNG. *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN*, 138 - 154.
- Juditha, C. (2015). Political Marketing Dan Media Sosial (Studi Political Marketing Capres RI 2014 Melalui Facebook). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 19 No.2*, 225-241.
- Khaerunnisa R. Abidin Y. Z. & Ma'arif, A. A. (2018). Aktivitas Kampanye Public Relations Dalam Mensosialisasikan Internet Sehat dan Aman. *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, 79-96.
- Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengaruh Efektifitas Media Sosial Twitter Terhadap Government Open Communication Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Masyarakat Bandung Analysis Influence the Effectiveness of Social.
- Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengaruh Efektifitas Media Sosial Twitter Terhadap Government Open Communication Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Masyarakat Bandung. *Analysis Influence the Effectiveness of Social Media Twitter Against Government Open Co*, 1652–1658.
- Movementi, S. (2015). *Bos Twitter Sebut Pengguna Indonesia Atraktif*. Retrieved from <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/26/072653165/Bos-Twitter-Sebut-Pengguna-Indonesia-Atraktif>
- Pertiwi, W. K.-s.-p.-b.-s.-m.-m.-s. (2021, Juli).
- Puspita, A. W. (2016). Analisis Penggunaan.
- Rohmiyati, Y. (2018). Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media. *Anuva*.
- S, A. S. (2017). Pelatihan Literasi Komunikasi Politik.
- Sahlan Marzuuqi, M. Y. (2019). Twitter Sebagai Media Propaganda (Analisis Wacana pada Tweet @TsamaraDKI dan @FaldoMaldini sebagai Media Propaganda Menjelang Pemilihan Presiden 2019).
- Sembiring. (2013). *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*. Retrieved from Website Resmi Kementerian Komunikasi: https://kominfo.go.id:443/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
- T., P. &. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Educations and Social Science Journal (CESSJ)*, 87-104.
- Tapsell, R. (2017). *Kuasa Media Di Indonesia*. jakarta: Marjin Kiri.
- Wahyu Nova Riski, Y. T. (2020). KOMUNIKASI POLITIK DARING: STUDI PERBINCANGAN POLITIK DI TWITTER PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2019. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 1 – 17.
- Yuliahari, D. (2016). Pemanfaatan Twitter Buzzer Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum. *Jurnal The Messenger*, 41-48.